

**TINJAUAN HISTORIS HAK PENDIDIKAN DI HINDIA-BELANDA PADA
MASA KOLONIAL TAHUN 1908-1928**

(Skripsi)

Oleh:

BUDI DARMOKO



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

TINJAUAN HISTORIS HAK PENDIDIKAN DI HINDIA-BELANDA PADA MASA KOLONIAL TAHUN 1908-1928

Oleh:

BUDI DARMOKO

Pendidikan Nasional yang kita miliki saat ini merupakan hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah pengalaman Bangsa Indonesia pada masa lampau. Karena pertumbuhan dan perkembangan sistem pendidikan itu berada dalam sejarah, sementara sejarah kita pernah mengalami penjajahan, maka sudah barang tentu di dalam dunia pendidikan kita juga mengalami pasang surut dan tidak lepas dari pengaruh penjajahan.

Sistem pendidikan Belanda diatur dengan sistem prosedural yang ketat dalam pelaksanaannya, sangat berbeda dengan sistem prosedural pada sistem pendidikan Islam yang telah dikenal sebelumnya serta pendidikan yang diadakan oleh kalangan Bumiputera. Sistem pendidikan Belanda yang dilaksanakan bersifat diskriminatif dan materialistis. Sekolah-sekolah dibentuk dengan membedakan pendidikan antara golongan Belanda, golongan Timur Asing, dan golongan Bumiputera.

Stratifikasi ini tentu saja mempengaruhi sistem pembelajaran yang diterima oleh masyarakat pribumi, yang mempengaruhi perbedaan-perbedaan yang cenderung pada perbedaan dalam hak mendapatkan pendidikan bagi tiap golongan stratifikasinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah hak pendidikan di Hindia-Belanda pada masa kolonial tahun 1908-1928. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui hak pendidikan di Hindia-Belanda pada masa kolonial tahun 1908-1928. Metode yang digunakan adalah metode historis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi, sedangkan untuk menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini dapat diambil gambaran sebagai berikut :

1. Pemerintah Belanda memberikan pendidikan bagi setiap golongan, namun pemerintah Belanda tidak memberikan hak sama kepada setiap golongan tersebut. Hak yang diberikan kepada golongan Eropa diberikan sekolah dan fasilitas terbaik sedangkan pribumi atau Bumiputera tidak sebaik golongan Eropa.
2. Pendidikan yang diberikan terhadap anak keturunan Eropa yaitu dengan mendirikan sekolah-sekolah yang berkualitas seperti di negeri Belanda. Sekolah tersebut selalu ada dalam pengawasan pemerintah Hindia Belanda sendiri.
3. Kebijakan pendidikan yang dijalankan Pemerintah Kolonial Belanda merupakan suatu taktik politik kolonial sehingga dengan adanya kebijakan tersebut sangat berpengaruh terhadap rendahnya kualitas pendidikan Bumiputera dibandingkan dengan pendidikan anak-anak Eropa, pendidikan Bumiputera ditekan sedemikian rupa agar tidak terlalu berkembang, tidak adanya kemerdekaan dan persamaan hak antara penjajah dan terjajah.

**TINJAUAN HISTORIS HAK PENDIDIKAN DI HINDIA-BELANDA PADA
MASA KOLONIAL TAHUN 1908-1928**

Oleh

BUDI DARMOKO

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HISTORIS HAK PENDIDIKAN DI HINDIA-BELANDA PADA MASA KOLONIAL TAHUN 1908-1928**

Nama Mahasiswa : **Budi Darmoko**

No. Pokok Mahasiswa : 1113033012

Jurusan : Pendidikan IPS

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. H. Iskandar Syah, M.H.

NIP 19521110 198703 1 001


Drs. Syaiful M, M.Si.

NIP 19610703 198503 1 004

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah


Drs. Zulkarnain, M.Si.

NIP 19600111 198703 1 001


Drs. Syaiful M, M.Si.

NIP 19610703 198503 1 004

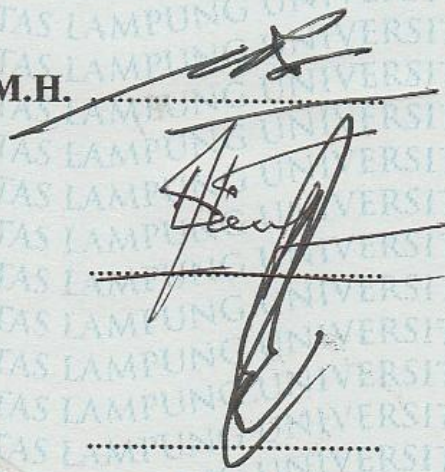
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. H. Iskandar Syah, M.H.**

Sekretaris : **Drs. Syaiful M, M.Si.**

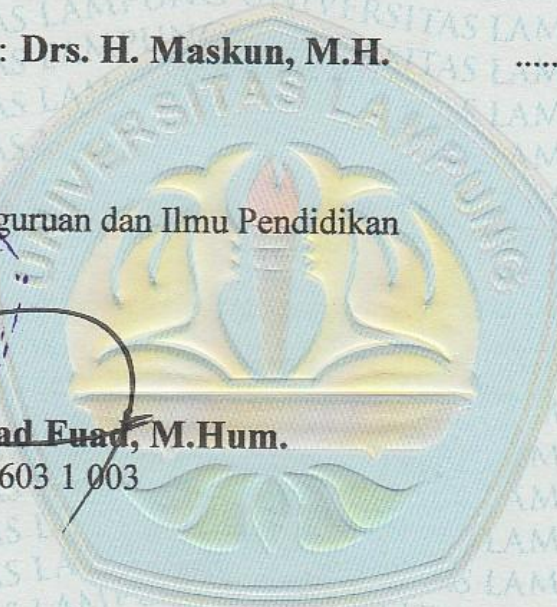
Penguji
Bukan Pembimbing : **Drs. H. Maskun, M.H.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum.

NIP 19590722 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Mei 2016**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Budi Darmoko

NPM : 1113033012

Fakultas / Jurusan : KIP / Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Alamat : Desa Sudimoro RT. 001 RW 001 Kec. Semaka, Kabupaten
Tanggamus.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Februari 2016



Budi Darmoko
NPM. 1113033012

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan lembaran-lembaran sederhana karya kecilku ini kepada :

- 1. Ayah dan Ibuku tersayang yang telah sepenuh hati membesarkan, mendidik, mendo'akan serta memberikan segala yang terbaik demi kesuksesanku yang takkan mungkin terbalaskan hingga akhir hayat. Mohon maaf bila selama ini telah banyak membuat Ayah dan Ibu kecewa. Mudah-mudahan kelak dapat lebih banyak memberi kebahagiaan dan membuat kalian bangga.*
- 2. Adikku Dwi Kurniawati dan Rizki Adi Prasetya yang selalu menyayangiku serta turut memberi semangat dan do'a dalam setiap langkahku.*
- 3. Almamater tercinta Universitas Lampung.*

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Sudimoro pada tanggal 09 Februari 1994, Putra pertama dari pasangan Bapak Bambang Sutomo dan Ibu Watini.

Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri 1 Sudimoro Bangun, yang diselesaikan pada tahun 2005, melanjutkan di SMP Negeri 2 Semaka Kabupaten Tanggamus yang diselesaikan pada tahun 2008 dan masuk SMA Muhammadiyah 1 Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis diterima di Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menempuh pendidikan di Pendidikan Sejarah, penulis memiliki pengalaman organisasi yaitu organisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ilmu Sosial sebagai Ketua bidang Sosmas dan Sekertaris Umum pada periode 2012-2013, dan menjabat Ketua Umum Fokma Pendidikan Sejarah periode 2013-2014.

MOTTO

Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya,....”

(Qs. An-Nahl: 1)

“Tidak ada kehidupan yang nyata bagi seorang pelamun, tidak ada kehidupan yang ceria bagi pemalas, dan tidak ada jawaban doa yang segera bagi penunda. Bersibuklah.”

(Mario Teguh)

SANWACANA

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Historis Hak Pendidikan di Hindia-Belanda Pada Masa Kolonial Tahun 1908-1928”. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.S., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Abdurahman, Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) FKIP Universitas Lampung.
6. Bapak Drs. Syaiful M. M.Si., Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung, sekaligus dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan

bimbingan, kritik, saran, dan nasehat kepada penulis dalam proses kuliah dan proses penyelesaian skripsi.

7. Bapak Drs. Iskandar Syah, M.H, dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing I, terima kasih atas segala kasih sayang tulus, nasehat serta bimbingannya untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Maskun, M.H, Pembahas utama yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan, kritik, saran, dan nasehat kepada penulis dalam proses kuliah dan proses penyelesaian skripsi.
9. Bapak dan Ibu dosen Pendidikan Sejarah FKIP yang telah membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah.
10. Septa Septia Sari terimakasih telah menemaniku dalam keadaan suka maupun duka.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan 2011 Agung, Alan, Ucep, Arif, Riyan, Indra, Resi, Nita, Donna, Suhanda, Heriyanto, Anita, Yuni, Alpina, Largo, M. Kadafi, Setio, Virio, Windri, Lusia, Nova, Umi, Julia, Neti, Lilis, Yulita, Hengki, Hari, Imam, Flowry, Marliyana, Putri, Neli, Desiana, Yoga, Wahyu, Aan, Nofri, Andre, Robet, serta teman-teman lain yang kiranya tidak dapat peneliti tuliskan satu persatu terima kasih atas kebersamaan kita selama ini dalam suka maupun duka, dan terimakasih pula untuk sebuah keluarganya semoga akan tetap terjalin sampai nanti.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Heizlan, Woko, Aulia, Bundo, Evi, Sevia, Pipah, Zania, Rosita, Lia, Helen, Dona, selama melaksanakan KKN dan PPL di Desa Penggawa V Tengah Kec. Karya Penggawa Pesisir Barat.

13. Kakak-kakak dan adik-adik tingkat, angkatan 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015.

14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih.

Penulis berdo'a semoga semua amal dan bantuan mendapat pahala serta balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, Februari 2016

Penulis,

Budi Darmoko

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.	xv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.	6
E. Ruang Lingkup Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN PARADIGMA	
A. Tinjauan Pustaka.	9
1. Konsep Tinjauan Historis.....	9
2. Konsep Hak Pendidikan Masa Kolonial Belanda.	10
3. Konsep Masa Pergerakan Nasional.....	14
B. Kerangka Pikir.....	17
C. Paradigma.	20
III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	22
B. Metode Yang Digunakan.....	23
C. Variabel Penelitian.	27
D. Teknik Pengumpulan Data.	28
a. Teknik Kepustakaan.....	28
b. Teknik Dokumentasi.....	29
E. Teknik Analisis Data.	30

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Gambaran Umum Pemerintah Belanda di Indonesia Sebelum 1900.....	33
1.1 Kondisi Stratifikasi Sosial Masyarakat Hindia-Belanda.	33
1.2 Pendidikan Kolonial Belanda Sebelum Politik Etis.	35
1.3 Pendidikan Kolonial Belanda Masa Politik Etis.....	41
2. Hak Pendidikan di Hindia-Belanda Pada Masa Kolonial	50
2.1 Pendidikan Bagi Golongan Eropa.	51
2.2 Pendidikan Bagi Golongan Bumiputera	52
2.3 Pendidikan Bagi Golongan Timur Asing	58

B. PEMBAHASAN

1. Hak pendidikan di Hindia-Belanda pada masa kolonial Belanda tahun 1908-1928	59
--	----

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.	68

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Perkembangan Sekolah Dasar dan Murid Antara Tahun 1900-1920.....	48
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Bagan Sistem Persekolahan Zaman Pemerintahan Hindia Belanda Abad Ke-20.....	72
2. Bagan Lama Pendidikan Zaman Pemerintah Hindia Belanda.	73
3. Foto-foto Sekolah Zaman Hindia Belanda.....	74
5. Surat Ijin Penelitian di Perpustakaan Unila.	76
6. Surat Ijin Penelitian di Perpustakaan Daerah Prov. Lampung.	77

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Nasional yang kita miliki saat ini merupakan hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah pengalaman Bangsa Indonesia pada masa lampau. Karena pertumbuhan dan perkembangan sistem pendidikan itu berada dalam sejarah, sementara sejarah kita pernah mengalami penjajahan, maka sudah barang tentu di dalam dunia pendidikan kita juga mengalami pasang surut dan tidak lepas dari pengaruh penjajahan tersebut.

Penjajahan oleh Pemerintah Kolonial Belanda terhadap kita Bangsa Indonesia yang merdeka, dilakukan dengan jalan mendominasi politik, eksploitasi ekonomi dan penghancuran secara berencana sistem budaya untuk diganti dengan budaya barat (Kansil dan Julianto, 1985:7). Kenyataan ini tentunya tidak dapat diterima oleh bangsa yang beradab, seperti bangsa Indonesia.

Untuk memperkuat kekuasaannya, pemerintah kolonial Belanda tidak memberi kesempatan kepada Bumi putera untuk mengenyam pendidikan, sehingga sebagian bangsa kita sempat untuk berpikir dan memang tidak mampu untuk memikirkan bagaimana cara untuk merdeka, untuk mengatur negara sendiri.

Dalam perkembangannya, pendidikan di Indonesia semakin mendapati tahapan barunya menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1900, yakni era ratu Juliana berkuasa di kerajaan Belanda. Pada tahun ini lahirlah kebijakan baru berdasar usulan Van Deventer, yang kemudian lebih dikenal dengan istilah Politik Etis (Politik Balas Budi). Bahwa pemerintah Belanda mempunyai utang budi dan tanggung jawab moral untuk menaikkan derajat dan kesejahteraan pribumi karena segala pembangunan dan kemewahan yang kini dirasakan masyarakat di negerinya di daratan Eropa, merupakan hasil dari kejamnya penghisapan yang dilakukan selama proses politik tanam paksa di Indonesia (1830-1870). Van Deventer menerapkan Politik Etis (*Etische Politiek*), dengan motto “*de Eereschuld*” (hutang kehormatan) dan slogan “*Educatie, Irigatie, Emigratie*”. Politik etis ini diarahkan untuk kepentingan penduduk Bumi putera dengan cara memajukan penduduk asli secepatnya melaalui pendidikan secara barat.

Politik etis ternyata menjadi program yang merugikan rakyat, karena pendidikan yang diberikan juga diharapkan dapat mengurangi dasar pendidikan nasional bangsa Indonesia seperti patriotisme, gotong-royong, berdikari, dan sebagainya. (Ary H. Gunawan, 1986:19) Prinsip-prinsip atau arah etis (*etische koers*) yang diterapkan dibidang pendidikan pada masa itu adalah:

1. Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk Bumiputera, untuk itu bahasa Belanda diharapkan dapat menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah.
2. Pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumiputera disesuaikan dengan kebutuhan mereka (Ary H. gunawan, 1986:19).

Pendidikan yang diterapkan oleh Belanda pada kenyataannya hanya ditujukan bagi orang pribumi (eksklusif). Hal ini dapat terlihat dari pembangunan lembaga-lembaga pendidikan yang hanya ditujukan bagi kalangan pribumi golongan atas saja. Dalam pendirian sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan tersebut banyak pertentangan di antara orang-orang Belanda sendiri, sehingga pendidikan yang diberikan sangat tidak maksimal. Keadaan ini memicu golongan-golongan elite seperti KH Ahmad Dahlan dan Ki Hajar Dewantara yang kemudian memberikan peluang bagi bangsa Indonesia lainnya untuk mengenyam pendidikan. Oleh karena itu pada abad-20 perkembangan pengajaran berkembang pesat terutama sesudah tahun 1900 banyak berdiri sekolah-sekolah pertikelir atau sekolah swasta (di luar sekolah bentukan pemerintah Belanda). Kebutuhan sekolah-sekolah yang dapat memenuhi pengajaran bagi bumiputera bermunculan mulai yang berhaluan politik sampai yang berhaluan agama. Adapun sekolah yang berhaluan politik seperti Taman Siswa, dan Sekolah Serikat Rakyat Semarang, sedangkan sekolah yang berhaluan komunis, seperti Sekolah Kesatrian Institut Bandung, dan sekolah yang berhaluan Agama yaitu, Serikat Islam, Muhammadiyah, Tawalib, Nahdatul Ulama, dan Persatuan Umat Islam. Selain sekolah-sekolah di atas ada juga sekolah yang tidak mempunyai corak apa-apa.

Sistem pendidikan Belanda diatur dengan sistem prosedural yang ketat dalam pelaksanaannya, sangat berbeda dengan sistem prosedural pada sistem pendidikan Islam yang telah dikenal sebelumnya serta pendidikan yang diadakan oleh kalangan Bumi putera. Sistem pendidikan Belanda yang dilaksanakan bersifat diskriminatif dan

materialistis. Sekolah-sekolah dibentuk dengan membedakan pendidikan antara golongan Belanda, golongan Timur Asing, dan golongan Bumiputera.

Pada zaman kolonial Belanda keadaan sosial sengaja dipelihara agar terbagi dalam golongan atau masyarakat yang hidup terkotak-kotak. Pembagian golongan sosial didasarkan pada keturunan bangsa dan status.

- a. Pembagian penduduk menurut hukum pada tahun 1848
 - Golongan Eropa
 - Golongan yang disamakan dengan golongan Eropa
 - Golongan Bumi Putera
 - Golongan yang disamakan dengan golongan Bumi Putera
- b. Tahun 1920, pembagian penduduk yang telah mengalami revisi menjadi seperti berikut ini:
 - Golongan Eropa;
 - Golongan Bumiputera;
 - Golongan Timur Asing.
- c. Pembagian penduduk menurut keturunan atau status, secara sosial terstratifikasi sebagai berikut:
 - Golongan bangsawan (aristocrat) dan pemimpin adat;
 - Pemimpin Agama (Ulama); dan
 - Rakyat Biasa.

Sejalan dengan landasan idiildan tujuan pendidikan pemerintah kolonial belanda yang berusaha mempertahankan sistem kolonialnya melalui artokrasi, maka sistem pendidikan dan persekolahan pun didasarkan pada golongan tersebut. Oleh karena itu terdapat jalur-jalur tertentu menurut penggolongan tersebut dalam mengikuti pendidikan di zaman Hindia-Belanda (Ary H, Gunawan, 1986 : 23).

Stratifikasi ini tentu saja mempengaruhi sistem pembelajaran yang diterima oleh masyarakat pribumi, yang mempengaruhi perbedaan-perbedaan yang cenderung pada penerimaan jenis pendidikan bagi tiap golongan stratifikasinya. Bagi masyarakat pribumi layanan pendidikan atau lembaga pendidikan ini tentu saja berbeda dengan anak-anak Belanda. Lembaga-lembaga pendidikan yang diterima oleh setiap golongan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah Hindia-Belanda yaitu:

1. Persekolahan anak-anak pribumi untuk golongan non priyayi menggunakan pengantar bahasa daerah, namanya Sekolah Desa 3 tahun. Mereka yang berhasil menamatkannya boleh melanjutkan ke sekolah sambungan (*Vervolg School*) selama 2 tahun. Dari sini mereka bisa melanjutkan ke sekolah Guru atau MULO pribumi selama 4 tahun, inilah sekolah paling atas untuk bangsa pribumi biasa. Untuk golongan pribumi masyarakat bangsawan bisa memasuki *His Inlandsche School* selama 7 tahun, Mulo selama 3 tahun, dan *Algemene Middlebare School* (AMS) selama 3 tahun.
2. Untuk orang timur asing disediakan sekolah seperti Sekolah Cina 5 tahun dengan pengantar bahasa Cina, *Hollandch Chinese School* (HCS) yang berbahasa Belanda selama 7 tahun. Siswa HCS dapat melanjutkan ke Mulo.
3. Sedangkan untuk orang Belanda disediakan sekolah rendah sampai perguruan tinggi yaitu, *Eropese Legere School* 7 tahun, sekolah lanjutan HBS 3 dan 5 tahun Lyceum 6 tahun, *Maddelbare Meisjeschool* 5 tahun, *Recht Hoge School* 5 tahun, sekolah kedokteran tinggi 8,5 tahun, dan kedokteran gigi 5 tahun. (W. Sanjaya, 2007 : 207)

Sekilas kebijakan ini memang menguntungkan bagi bangsa Indonesia, akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata pendidikan itu diarahkan untuk kepentingan Pemerintah Kolonial Belanda itu sendiri. Dimana produk dari proses pendidikan tersebut hanya mampu untuk menjadi buruh Pemerintahan Kolonial.

Masa Pergerakan Nasional merupakan masa yang sangat penting dan bersejarah bagi dunia pendidikan di Indonesia, karena kebangkitan nasional juga kebangkitan dunia pendidikan dan sekaligus sebagai reaksi terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda, yang salah satunya adalah dalam bidang pendidikan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah hak pendidikan di Hindia-Belanda pada masa kolonial tahun 1908-1928?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak pendidikan di Hindia-Belanda pada masa kolonial tahun 1908-1928.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti maupun pada pihak-pihak yang membutuhkan dengan bertambahnya wawasan ilmu pengetahuan mengenai hak pendidikan di Hindia-Belanda pada masa kolonial tahun 1908-1928.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Subjek Penelitian

Pemerintah kolonial Belanda.

2. Objek Penelitian

Hak pendidikan di Hindia-Belanda pada masa kolonial tahun 1908-1928.

3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah perpustakaan Unila dan perpustakaan daerah Lampung.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dalam penelitian ini adalah tahun 2016.

5. Kosentrasi Ilmu

Kosentrasi Ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu Sejarah.

REFERENSI

Ary. H. Gunawan. 1995, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Di Indonesia*. Bina Aksara : Jakarta. Halaman 19

Ibid. Hal. 19

Ibid. Hal. 23

Djumhur, I, Danasuprata, H, Drs. 1976, *Sejarah Pendidikan*, Bandung : CV Ilmu, Halaman 135

Kansil, Julianto. 1985, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Erlangga : Jakarta. Halaman 7

W. Sanjaya. 2007. *Kajian Kurikulum dan Pembelajaran*. Bandung : Sekolah Pasca Sarjana UPI. Hal. 207

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN PARADIGMA

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan dijadikan topik penelitian, dimana dalam tinjauan pustaka akan dicari teori atau konsep-konsep atau generalisasi-generalisasi yang akan dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah :

1. Konsep Tinjauan Historis

Secara etimologis tinjauan historis terdiri dari dua kata yakni tinjauan dan historis. Kata tinjauan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata tinjau yang memiliki arti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Sedangkan kata historis berasal dari bahasa latin istoria yang memiliki arti kota istoria yaitu kota ilmu di Yunani. Kemudian kata istoria dalam perkembangannya diperuntukan bagi pengkajian terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal pengkajian ilmu sejarah.

Menurut J.V.Brice, Sejarah adalah catatan-catatan dari apa yang telah dipikirkan dan diperbuat oleh manusia. Sedangkan menurut R.G. Collengwood, sejarah ialah sejenis

bentuk penyelidikan atau suatu penyiasatan tentang perkara-perkara yang telah dilakukan oleh manusia pada masa lampau. Sementara itu, menurut Mohammad Yamin yang dikutip oleh R. Mohammad Ali bahwa, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. (Mohammad Ali. 1963: 5)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditegaskan bahwa sejarah adalah suatu ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lampau yang dilakukan manusia dan ditulis secara kritis dan sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa tinjauan historis memiliki pengertian sebagai suatu bentuk penyelidikan ataupun penelitian terhadap gejala peristiwa masa lampau manusia baik individu maupun kelompok beserta lingkungannya yang ditulis secara ilmiah, kritis dan sistematis yang meliputi ukuran fakta dan masa kejadian peristiwa yang telah berlalu itu (kronologis), dengan tafsiran dan penjelasan yang mendukung serta memberikan pengertian terhadap gejala peristiwa tersebut.

2. Konsep Hak Pendidikan Masa Kolonial Belanda

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam bidang pendidikan pada tahun 1908-1928 di Indonesia sebenarnya hanya melanjutkan kebijakan yang diterbitkan oleh keputusan Raja Belanda.

Keputusan Raja Belanda tertanggal 30 September 1848 Nomor 95, yang memberikan wewenang kepada Gubernur Jendral (pada waktu itu Van Den Bosch) untuk menyediakan f25.000 setahun bagi pendirian sekolah-sekolah bumiputera di pulau Jawa dengan tujuan untuk mendidik calon-calon pegawai negeri (Djumhur dan Danasuparta, 1974:122).

Maka antara tahun 1849-1852 didirikan 20 buah sekolah untuk anak-anak Indonesia di tiap-tiap ibukota keresidenan. Ketika itu sudah ada 30 buah sekolah untuk anak-anak Belanda, sekolah itu masih terbatas pada anak-anak bangsawan saja. Anak-anak rakyat jelata tidak diperkenankanya.

Untuk melaksanakan keputusan tahun 1848 itu, pemerintah kolonial menghadapi dua macam kesulitan, yakni:

1. Kesulitan mengenai bahasa pengantar di sekolah-sekolah bumi putera, yang harus di tiap-tiap ibukota keresidenan itu.
2. Kekurangan tenaga guru.

Akhirnya diputuskan, bahwa bahasa pengantar di sekolah-sekolah itu ialah bahasa daerah, sedangkan bahasa melayu diberikan sebagai mata pelajaran (Djumhur dan Danasuparta, 1974:123).

Pada tahun 1893 timbullah diferensiasi pengajaran bumi putera, hal-hal yang menyebabkan yaitu:

1. Hasil sekolah-sekolah bumiputera kurang memuaskan pemerintah kolonial.
2. Di kalangan pemerintah mulai timbul “perhatian” pada rakyat jelata. Akibat-akibat langsung dari diferensiasi pengajaran bumi putera itu adalah :
 1. *Reorganisai Hoofden School*.
 2. Dibatasinya pemasukan anak-anak Indonesia ke sekolah-sekolah Belanda (Djumhur dan Danasuparta, 1974:131).

Kebijakan tentang sekolah rendah pada masa kolonial, sebagai contoh, lebih diperuntukan bagi kaum priyayi, bukan untuk semua rakyat pribumi (*inlander*). Kedua, kebijakan populis, yakni kebijakan yang arah dan peruntukannya bagi rakyat banyak. Kebijakan ini muncul karena adanya kritik terhadap kebijakan pendidikan

yang elitis, oleh bangsawan Belanda dan ditambah dengan keputusan Ratu Belanda, telah melahirkan kebijakan yang lebih moderat, yakni politik etis, atau politik balas budi. Salah satu pemrakarsa kebijakan seperti itu adalah Van Deventer dengan Triloginya, yaitu irigasi, migrasi, dan edukasi. Kebijakan seperti itu dikenal dengan kebijakan pendidikan moderat.

Berkaitan dengan “arah etis” yang menjadi landasan idiil dari langkah-langkah dalam pendidikan di Hindia Belanda, maka pemerintah mendasar kebijakan-kebijakannya pada pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk bumi putera.
2. Pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumi putera (Djumhur dan Danusuparta, 1974:135).

Tujuan dari pendidikan yang dijalankan oleh Belanda di arahkan untuk memenuhi keperluan tenaga buruh kasar untuk kepentingan kaum modal Belanda. Sebelum diberlakukannya politik etis, belanda telah melaksanakan pendidikan bagi golongan tertentu dengan kebijakan kurikulum yang berbeda disetiap golongannya, yang dianggap sangat merugikan rakyat Indonesia khususnya golongan pribumi. Sejak diberlakukan politik etis banyak sekali perubahan kebijakan yang mulai diberlakukan pada sistem pendidikan barat.

Tujuan sistem pendidikan Belanda agar penduduk Bumiputera, cina dan golongan lainnya berkesempatan memperoleh pendidikan barat, untuk pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Selain itu juga dimaksudkan agar dengan pengajaran barat tersebut secara berangsur-angsur dapat mengurangi dasar pengajaran nasional bangsa kita, seperti patriotisme, gotong royong, berdikari dan sebagainya. (Ary. H. Gunawan. 1995:19)

Tentunya dalam pelaksanaan pendidikan tersebut Belanda memiliki sistem pendidikan yang menggunakan cara dan gagasan Belanda dalam menerapkan pendidikan ala kolonial bagi rakyat jajahan.

Adapun ciri-ciri pendidikan yang dijalankan oleh Belanda antara lain:

1. Gradualisme, dalam penyediaan pendidikan bagi anak Indonesia.
2. Dualisme, dengan menekan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dengan pendidikan pribumi.
3. Kontrol sentral yang kuat.
4. Keterbatasan tujuan, sekolah bagi pribumi untuk menghasilkan pegawai sebagai faktor penting dalam perkembangan pendidikan.
5. Prinsip Konkordasi, maka sekolah di Indonesia sama dengan di Negeri Belanda.
6. Tidak ada perencanaan pendidikan yang sistematis bagi anak pribumi (S. Nasution, 1987:20).

Kebijakan dalam pelaksanaan pendidikan ala barat selalu berpegang pada prinsip-prinsip atau arah etis yang tidak terlepas dari kebijaksanaan di bidang pendidikan pada masa ini. Adapun prinsip-prinsip atau arah pelaksanaan pendidikan barat ini adalah:

1. Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi pribumi. Bahasa Belanda diupayakan menjadi bahasa pengantar pendidikan;
2. Pendidikan rendah bagi pribumi disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sistem pendidikan pada masa ini belum lepas dari pola stratifikasi sosial yang telah ada, dan beroleh pengesahan legal sejak tahun 1848 dari penguasa kolonial. (Depdikbud, 1979:15)

Jadi yang dimaksud dengan kebijakan dengan kebijakan pendidikan pemerintah kolonial Belanda adalah keputusan atau wewenang Belanda dalam pelaksanaan politik pendidikan di Indonesia yang sistem pendidikannya tidak terlepas dari komponen jaringan kerja saling berhubungan dalam menanamkan pengetahuan, kecakapan kepada rakyat Hindia Belanda di bidang-bidang ilmu tertentu yang berhubungan dengan kepentingan mereka.

Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, sejak diterapkan politik etis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar Bahasa Belanda (ELS,HCS,HIS), sekolah dengan pengantar bahasa daerah (IS,VS,VgS), dan sekolah peralihan.
2. Pendidikan lanjutan meliputi pendidikan umum (MULO,HBS,AMS) dan pendidikan kejuruan.
3. Pendidikan tinggi. (Djohan Makmur, 1993:24)

Dapat diketahui walaupun Belanda menyelenggarakan pendidikan bagi rakyat Hindia Belanda, tetapi tetap saja harus menempuh banyak jalur pendidikan yang sudah diatur dalam kurikulum yang diberlakukan dengan tujuan mempersulit bangsa Indonesia untuk mengenyam pendidikan barat setinggi-tingginya.

3. Konsep Masa Pergerakan Nasional di Indonesia

Bangkitnya Nasionalisme di Indonesia memang tidak dapat dipisahkan dari proses bangkitnya Nasionalisme di Asia. Namun demikian dikatakan bahwa timbulnya Pergerakan nasional di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh bangkitnya nasionalisme di Asia tetapi juga oleh faktor-faktor yang lebih dominan.

1. Pengertian Pergerakan Nasional

Istilah “pergerakan” sebenarnya mengandung pengertian khusus yang berbeda dengan pengertian “perjuangan”. Menurut Drs. Susanto Tirtoprojo, S.H. Istilah “pergerakan mengandung pengertian gerak yang mempunyai tujuan tertentu, serta menggunakan organisasi yang teratur” (Susanto Tirtiprojo,1985:7).

Dengan demikian pergerakan itu berarti perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, untuk mengakhiri penjajahan, bersifat pergerakan, yang artinya perjuangan tersebut telah berbentuk organisasi yang teratur.

Nasionalisme berarti :

“Kesadaran diri yang meningkat dan yang diwujudkan oleh kecintaan yang melimpah pada negeri dan bangsa sendiri dan kadang-kadang disertai akibat mengecilkan dan menghilangkan arti dan sifat bangsa-bangsa lain” (Suhartoyo Harjosatoto,1985:42). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pergerakan nasional adalah perjuangan dari bangsa Indonesia yang dijajah untuk melawan penjajah itu sendiri guna mendirikan suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, pergerakan mana timbul dari kesadaran diri dan kecintaan akan tanah air.

2. Tujuan Pergerakan Nasional

Kalau pergerakan didefinisikan sebagai suatu pergerakan yang mengandung pengertian gerak yang mempunyai tujuan tertentu, maka setiap gerak dari proses pergerakan nasional itu juga mempunyai tujuan tertentu.

Pergerakan nasional seirama dan sehalak dengan nasionalisme itu sendiri, ini berarti tujuan pergerakan nasional itu sendiri identik dengan tujuan nasionalisme.

Menurut Verdoom,

“Nasionalisme di Indonesia tujuannya ialah menenyapkan tiap-tiap bentuk kekuasaan penjajah dan mencapai suatu keadaan yang memberi tempat untuk perkembangan merdeka bangsa Indonesia” (Kansil, 1985 : 19).

Sedangkan menurut Sosiolog Bouman,

“Nasionalisme Indonesia itu luas sifatnya ialah perasaan menjadi anggota masyarakat besar yaitu bangsa Indonesia, tetapi syarat mutlak untuk mencapai maksud itu ialah menenyapkan sistem kolonialisme yang menekan bangsa Indonesia dalam keadaan yang buruk” (Kansil, 1985 : 19).

Dari uraian diatas jelaslah bahwa tujuan pokok dari nasionalisme Indonesia ialah mencapai kemerdekaan dan menenyapkan sistem kolonialisme, dan tujuan mencapai kemerdekaan dan menenyapkan sistem kolonialisme ini merupakan tujuan pergerakan nasional Indonesia.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pergerakan nasional, antara lain adalah :

Faktor yang berasal dari luar negeri (eksternal), antara lain:

- a. Pada waktu itu pada umumnya bangsa-bangsa di Asia sedang menghadapi imperialisme Barat. Hal inilah yang mendorong bangkitnya nasionalisme Asia. Selain itu kemenangan Jepang dalam perang melawan Rusia tahun 1905 juga membuktikan bahwa ternyata Bangsa Timur dapat juga mengalahkan Bangsa Barat. (Kansil, 1985:16)
- b. Disamping adanya gerakan Turki Modern dibawah pimpinan Mustafa Kemal Pasya, perjuangan Negara-negara islam juga memberikan dorongan kepada perjuangan pergerakan kaum muslim di Indoensia yang berdasarkan atas nasionalisme (R. Ambarman, 1980:71).

Faktor yang berasal dari dalam negeri (internal), yaitu adanya rasa tidak puas, penderitaan, rasa kesedihan dan kesengsaraan dari bangsa Indonesia terhadap penjajahan dan penindasan kolonial. Ketidakpuasan itu sebenarnya sudah lama

mereka ungkapkan melalui perlawanan bersenjata melawan Belanda di berbagai daerah, antara lain: perlawanan yang dipimpin oleh Pattimura, Teuku Umar, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro dll. Namun perlawanan-perlawanan itu menemui kegagalan karena di antara mereka masih belum ada rasa persatuan nasional. Kegagalan demi kegagalan inilah yang menyadarkan para pemimpin bangsa atau dalam hal ini kaum pergerakan nasional untuk merubah taktik dan strategi perjuangan melawan penjajah di mana semula gerakan baru ini disebut “Gerakan Emansipasi” yang hakekatnya merupakan menifestasi dari proses kebangkitan suatu bangsa dengan cita-cita pembaharuan. Gerakan ini di Indonesia oleh pemerintah Belanda disebut dengan istilah “*Inlandsche Reweging*” (Kansil, 1985:17).

Masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibagi menjadi, Masa Perintis (1908-1927), Masa Penegas (1927-1934), Masa Pencoba (1934-1945), Masa Pendobrak (1945-1950), dan Masa Pelaksana (1945 dan seterusnya) atau Masa Pembangunan (Mohammad Sidky Daeng Materu, SH, 1985 : 3).

B. Kerangka Pikir

Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia tidak hanya membawa perubahan di bidang pemerintah dan perekonomian, namun di bidang pendidikan, bangsa Belanda banyak campur tangan mengenai perubahan dan perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Bidang pendidikan yang diberikan Belanda adalah sebagian dari politik pemerintahan Hindia-Belanda dalam penjajahannya, yang sebelum terlaksananya

politik etis, merubah segalanya dan memberikan banyak sekali perbedaan-perbedaan baik dalam pelaksanaan pengajaran seperti fasilitas belajar, tenaga pengajar, jenjang pendidikan, hingga kurikulum.

Kebijakan yang terpenting di antara kebijakan-kebijakan politik produk pemerintah Hindia-Belanda adalah pada kebijakan politik pendidikannya. Hal ini sebagaimana dikatakan Brugmans bahwa, politik pendidikan bukan hanya suatu bagian dari politik kolonial akan tetapi merupakan inti politik kolonial. Oleh karena itu, diselenggarakannya pendidikan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda lebih ditekankan pada kepentingan penjajah daripada rakyat jajahannya sendiri. Kalaupun pada akhirnya kolonial Belanda membuka kesempatan bagi rakyat pribumi, tujuannya tidak lain “membentuk kelas elit dan menyiapkan tenaga terdidik sebagai buruh rendahan atau kasar.” Awalnya sekolah yang diberikan oleh Belanda sangat terbatas, hal ini disesuaikan dengan didirikannya sekolah-sekolah yang berhubungan dengan pemenuhan tenaga kerja murah bagi Belanda.

Memasuki abad ke-20, politik etis merubah sistem pendidikan terutama dalam pendirian lembaga pendidikan. Walaupun politik etis memandang pendidikan sebagai alat untuk memajukan spiritual material bangsa Indonesia, namun jelas sekali pendidikan yang dilaksanakan tidak terlepas dari politik penjajahan Belanda. Awal di berlakukannya politik etis, sekolah yang diberikan kepada semua golongan tidak terlepas di berlakukannya kebijakan penggunaan bahasa Belanda. Sekolah yang didirikan Belanda mulai diberikan sesuai kebutuhannya dan disesuaikan golongan mana saja yang dapat duduk di sekolah tersebut. Sistem pendidikan Belanda diatur dengan

prosedur yang ketat dari mulai aturan siswa, pengajar, dan kurikulum, dapat dikatakan bahwa pemerintah Belanda sangat bersifat diskriminatif.

Lembaga pendidikan yang diberikan diterapkan dengan berbagai kebijakan yaitu, kebijakan pendidikan bagi golongan Eropa, kebijakan pendidikan bagi golongan Bumiputera dan kebijakan bagi golongan Timur Asing. Rakyat Indonesia atau golongan pribumi yang diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan barat, tidak berarti dapat dengan mudah menerima pendidikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Belanda melaksanakan pendidikan hanya sekedar menjalankan politiknya hanya untuk mendukung kegiatan perekonomian Belanda selama menjajah di Indonesia. Pendidikan yang diberikanpun sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia, Belanda hanya mendidik anak-anak pribumi menjadi pegawai rendahan.

C. Paradigma



Ket :

—————▶ : Garis Pembagian

REFERENSI

- Ary. H Gunawan. 1995, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Di Indonesia*. Bina Aksara : Jakarta. Halaman 19
- C.S.T Kansil. 1985, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Erlangga : Jakarta. Halaman 16
- Ibid.* Halaman 17
- Ibid.* Halaman 19
- Danasuparta, Djumhur. 1974, *Sejarah Pendidikan*. CV Ilmu : Bandung. Halaman 123
- Ibid.* Halaman 131
- Ibid.* Halaman 135
- Depdikbud. 1979. *Pendidikan di Indonesia dari Jaman Ke Jaman*. Jakarta : Balai Pustaka. Halaman 15
- Djohan, Makmur. 1993. *Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: Menggala Bhakti. Halaman 24
- Muhammad Ali, 1963, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa : Bandung. Halaman 5
- S. Nasution,. 1987. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung : Jemmars. Halaman 20
- Suhartoyo Harjosatoto, Drs., 1980, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Suatu Analisa Ilmiah*. Yogyakarta : Liberty. Halaman 42
- Susanto Tirtoprojo, 1968, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Jakarta : PT. Pembangunan. Halaman 7
- Winarno Surakhmad, 1987, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsito : Bandung. Halaman 12

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan faktor yang penting dalam memecahkan suatu masalah yang turut menentukan suatu penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa “metode merupakan suatu cara atau jalan yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan suatu penelitian. Metode yang berhubungan dengan ilmiah adalah menyangkut masalah kerja, yakni cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.” (Husin Sayuti, 1989:32).

Metode adalah suatu rangkaian pengertian dasar, kerangka dasar, tetapi penerapannya merupakan bagaian dari proses yang diawasi oleh si peneliti dengan tidak terlalu ketat (Basri MS, 2006:1).

Dalam suatu penelitian, metode adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode adalah cara kerja yang ditempuh seseorang dalam melakukan suatu penelitian guna mendapatkan kebenaran dari tujuan yang diharapkan.

B. Metode Yang Digunakan

Setiap penelitian, metode merupakan faktor yang paling penting untuk memecahkan suatu masalah yang turut menentukan keberhasilan penelitian. Di dalam penelitian, metode merupakan faktor penting untuk memecahkan masalah yang turut menentukan keberhasilan suatu penelitian. Menurut Winarno Surahkmat, “metode adalah cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik serta alat tertentu” (Winarno Surahkmat, 1982: 121).

Sedangkan menurut Husin Sayuti menegaskan bahwa “metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan” (Husin Sayuti, 1989: 32).

Pendapat lain mengatakan bahwa “metode merupakan jalan yang berkaitan dengan kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan (Joko Subagyo, 2006: 1).

Kemudian Sumadi Suryabrata, mengemukakan bahwa metode merupakan susunan pengetahuan yang teratur dan runut pada umumnya merupakan manifestasi dari pandangan filsafatnya mengenai “pengetahuan yang benar” yang biasa dikupas dalam Filsafat Ilmu Pengetahuan dan Epistemologi (Sumadi Suryabrata, 2000: 10).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan. Oleh karenanya, metode penelitian sangat dibutuhkan dalam memecahkan suatu masalah yang turut menentukan keberhasilan suatu penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis, karena penelitian ini mengambil objek dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Menurut Louis Gottschalk, metode historis adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu. (Louis Gottschalk, 1986:32), selain itu para ahli juga mengatakan bahwa:

Metode penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa lalu, selanjutnya kerap kali juga hasilnya dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang (Hadari Nawawi, 2001: 79).

Metode penelitian historis adalah suatu usaha untuk memberikan interpretasi dari bagian trend yang naik turun dari suatu status keadaan di masa lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan dengan keadaan sekarang dan dapat meramalkan keadaan yang akan datang (Mohammad Nazir, 1988: 56).

Sedangkan menurut pendapat Louis Gottschalk yang dikutip Hermanto, menyatakan bahwa metode penelitian historis adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, data-data yang telah teruji dan dianalisis tersebut, tersusun menjadi sebuah kisah sejarah (Hermanto, 2009: 61).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian historis adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menganalisis secara kritis peninggalan masa lampau berupa data dan fakta atau dokumen yang disusun secara sistematis, dari evaluasi yang objektif dari data yang berhubungan dengan kejadian masa lampau untuk memahami kejadian atau keadaan baik masa lalu maupun masa sekarang.

Tujuan dari Penelitian Historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, memverifikasikan,

mensistesisikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. “dalam penelitian historis” tergantung kepada dua macam data, yaitu data skunder dan data primer. Data primer dari sumber primer, yaitu peneliti secara langsung melakukan observasi atau penyaksian kejadian-kejadian yang dituliskan. Data skunder diperoleh dari sumber skunder, yaitu peneliti melaporkan hasil observasi orang lain yang satu kali atau lebih telah terlepas dari kejadian aslinya. Di antara kedua sumber itu, sumber primer dipandang sebagai memiliki otoritas sebagai bukti tangan pertama, dan diberikan prioritas dalam pengumpulan data (Sumadi Suryabrata, 2006: 16-17).

Dapat disimpulkan bahwa setiap penelitian, harus dilihat sifat-sifat penelitian yang dipakai. Dengan demikian sifat Penelitian Historis adalah sifat data yang ditentukan oleh sumber yang diperoleh seperti data primer dan data sekunder. Data-data ini dikumpulkan lalu diklasifikasikan, tidak hanya itu saja dalam setiap penelitian dibutuhkan langkah-langkah dalam mengolah data menjadi sebuah tulisan.

Adapun langkah-langkah dalam penelitian historis, yaitu:

1. Heuristik dilakukan dalam penelitian ini menemukan sumber data, karena sumber sejarah yang objektif akan memberikan keyakinan dan kebenaran akan gejala peristiwa sejarah, sehingga dapat menghilangkan keraguan atau perselisihan pada penilaian kebenaran akan suatu peristiwa. Sehubungan dengan penyusunan karya ilmiah ini penulis mencari sumber data dari buku-buku literatur dan dokumen-dokumen.

Suatu prinsip di dalam heuristik adalah sejarawan harus mencari sumber primer. Sumber primer dalam penelitian sejarah adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata. Hal ini dalam bentuk dokumen, misalnya catatan sidang, catatan rapat, daftar anggota organisasi, dan arsip laporan pemerintah atau organisasi. Adapun sumber koran, majalah, dan buku adalah sumber sekunder. Dengan demikian langkah heuristik adalah mencari sumber primer, apabila tidak memungkinkan baru sumber sekunder.

Untuk penelitian dokumen *library research*, yang dilakukan penulis adalah menggunakan sumber skunder yaitu penulis melakukan telaah dokumen dari buku-buku yang di tulis oleh beberapa pengarang.

2. Kritik, setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan kritik yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern ini menyangkut bahasa dokumen-dokumennya, kalau ada dokumen misalnya, diteliti apakah dokumen itu memang yang kita kehendaki, apakah palsu atau sejati, apakah dapat dipahami bahasanya, ataukah sudah di ubah bagian-bagiannya. Kalau sudah dipahami bahasa dokumen itu yang dikehendaki, baru di nilai isinya. Menilai isinya itu dilakukan dengan kritik intern.
3. Interpretasi, setelah penulis melakukan langkah ke dua, yaitu kritik terhadap sumber data, kemudian terkumpul fakta-fakta, maka langkah berikutnya adalah langkah interpretasi atau penafsiran fakta-fakta sejarah.

Dalam menginterpretasikan fakta sejarah dalam rangkaian suatu kesatuan yang harmonis dapat dipercaya dan masuk akal.

4. Historiografi, sebagai langkah terakhir dalam penggunaan metode historis adalah historiografi, yang dimaksudkan disini penulisan serangkaian fakta-fakta yang berhubungan dengan perbedaan hak mendapatkan pendidikan pada masa kolonial Belanda 1908-1928.

C. Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu konsep yang dinilai, sedangkan variabel dalam suatu penelitian merupakan hal yang paling utama karena merupakan suatu konsep dalam suatu penelitian.

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi inti perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 1990: 91). Sedangkan Sumadi Suryabrata mengemukakan, bahwa variabel adalah sebagai gejala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian (Sumadi Suryabrata, 1983: 126).

Menurut Hadari Nawawi (1996: 55) “variabel adalah himpunan sejumlah gejala yang memiliki beberapa aspek atau unsur di dalamnya yang dapat bersumber dari kondisi objek penelitian, tetapi dapat pula berada di luar dan berpengaruh pada objek penelitian”. Lebih lanjut Sugiyono mengatakan bahwa “variabel adalah objek penelitian/atribut, atau apa yang menjadi variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik” (Sugiyono, 2009: 60).

Dapat peneliti simpulkan pendapat-pendapat di atas yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah sebuah himpunan atau objek yang mempunyai nilai dan menjadi pusat perhatian dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel tunggal dengan fokus penelitian pada apa saja perbedaan hak mendapatkan pendidikan pada masa kolonial Belanda 1908-1928.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian tehnik pengumpulan data dan alat yang digunakan akan menentukan kualitas penelitian. Oleh karena itu tehnik pengumpulan data harus diusahakan cara yang cermat dan memenuhi syarat-syarat pengumpulan data yang teabilitas dan validitas, dengan demikian relevansi data yang diperoleh akan menentukan tujuan penelitian, sehingga sampai pada suatu kesimpulan.

Untuk memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan masalah yang akan di bahas maka penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Teknik Kepustakaan

Untuk memperoleh informasi mengenai berbagai hal yang disebutkan di atas, maka dilakukan penelaahan kepustakaan, dan sumber bacaan adalah merupakan bagian penunjang penelitian.

Menurut Muhammad ali dalam bukunya Penelitian Kependidikan Prosedur dan strategi, beliau berpendapat: setiap peneliti seyogyanya berusaha untuk mengumpulkan berbagai informasi, baik berupa teori-teori, generalisasi, maupun

konsep yang dikemukakan oleh para ahli yang ada pada sumber kepustakaan, (Muhammad Ali, 1987; 43).

Dengan demikian tehnik kepustakaan berguna sebagai sumber beberapa informasi baik berupa teori-teori, generalisasi, dan bahan-bahan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

b. Teknik Dokumentasi

Menurut pendapat Suharsimi Arikunto (2002 ; 206), teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, mjalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya. Sementara itu menurut Basrowi dan Suwardi, mengatakan bahwa tehnik dokumentasi juga dapat diartikan sebagai suatu metode atau cara mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi dan Suwardi, 2008; 158).

Pendapat lain mengatakan bahwa tehnik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui sumber tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain, yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti (Nawawi, 1993; 134).

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seorang peneliti dalam mengumpulkan data tidak hanya terbatas pada literatur tetapi juga melalui tetapi juga melalui pembuktian atau mencari data lain yang berupa catatan, transkrip, buku, surat

kabar, majalah, prasati, notulen rapat, lengger, agenda, gambar arkeologi dan lain sebagainya.

E. Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian, analisis data merupakan hal yang sangat penting, karena data yang diperoleh akan lebih memiliki arti bila telah dianalisis. Kecermatan dalam memilih teknik analisis dalam sebuah penelitian sangat diperlukan. Setelah data penelitian diperoleh maka langkah peneliti selanjutnya adalah mengolah dan menganalisa data untuk di interpresasikan dalam menjawab permasalahan penelitian yang telah diajukan.

Karena penelitian ini adalah data kualitatif, dengan demikian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisi data kualitatif, yang berupa fenomena-fenomena dan kasus-kasus dalam bentuk laporan dan karangan sejarawan, sehingga memerlukan pemikiran yang teliti dalam menyelesaikan masalah penelitian dan mendapatkan kesimpulan.

Adapun definisi kualitatif adalah data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau memuatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya (Joko Subagyo, 2006: 106).

Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisi data dilakukan melalui beberapa tahapan yang diperlukan dalam menganalisis data-data tersebut.

Menurut Miles dan Huberman, yang dikutip H.B. Sutopo, tentang tahapan-tahapan dalam proses analisis data kualitatif meliputi:

1. Reduksi Data yaitu sebuah proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan di lapangan. Reduksi data juga merupakan bentuk analisis yang tajam, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu serta mengorganisir data sampai akhirnya bisa menarik kesimpulan.
2. Penyajian Data yaitu data yang dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun, memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, sehingga dalam penganalisis atau mengambil tindakan nantinya akan berdasarkan pemahaman yang di dapat dari penyajian tersebut.
3. Verifikasi data yaitu menarik sebuah kesimpulan secara utuh setelah semua makna-makna yang muncul dari data sudah diuji kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang jelas kegunaanya dan kebenarannya (H.B. Sutopo, 2006: 113).

REFERENSI

- Hadari Nawawi. 2001. *Penelitian Terapan*. Gajah Mada University Press : Yogyakarta. Halaman 79
- Husin Sayuti. 1989. *Pengantar Metodologi Riset*, Fajar Agung : Jakarta. Halaman 32
- Louis Gottschalk. 1983. *Mengerti Sejarah*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia : Jakarta. Halaman 32.
- Ibid.* Halaman 35
- Mohammad Ali. 1987. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa : Bandung. Halaman 43.
- Prof. A. Daliman, M.Pd. 1900. *Metode Penelitian Sejarah*,
- Suharsimi Arikunto. 1990. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta : Jakarata. Halaman 91
- Surakhmad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsito : Bandung. Halaman 121
- Suryabrata, Sumadi. 1983. *Beberapa Aspek Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: PT. Bina Aksara. Halaman 126
- Ibid.* Halaman 120.
- Ibid.* Halaman 177.
- Ibid.* Halaman 55
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta : Bandung. Halaman 60

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

Politik Etis yang diprakarsai oleh Van Deventer dalam tulisannya yang berjudul “Hutang Kehormatan” menganjurkan agar melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda, khususnya pada bidang pendidikan. Pendidikan yang dilaksanakan tidak terlepas dari sifat diskriminatif pemerintah Hindia Belanda. Adapun implementasi yang dilakukan Belanda dalam pendidikan adalah :

- a. Pendidikan bagi golongan Eropa
 1. Pemerintah Kolonial memberikan kesempatan belajar yang lebih mudah dan cepat dibandingkan jejang pendidikan bagi golongan lainnya.
 2. Tujuan dari pendirian sekolah-sekolah tinggi guna memberikan kesempatan bagi anak-anak Belanda, untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan.
- b. Pendidikan bagi golongan Bumiputera
 1. Kesempatan mendapatkan pendidikan diutamakan kepada anak-anak bangsawan Bumiputera serta tokoh terkemuka dan pegawai kolonial.

2. Bagi anak-anak keturunan rakyat biasa Pemerintah Kolonial memang menyediakan fasilitas, akan tetapi fasilitas tersebut sangat terbatas dimana mereka hanya dapat mengenyam pendidikan di Sekolah Desa dan Sekolah Bumiputera kelas dua.
- c. Pendidikan bagi golongan Timur Asing
1. Pemerintah Kolonial memberikan pendidikan bagi golongan Timur Asing disamakan pada sistem pendidikan yang diberlakukan untuk anak-anak Bumiputera, sedangkan kurikulum dan lainnya yang menyangkut pembelajaran dibuat kebijakan yang uniform dengan sekolah-sekolah ala Barat.

B. Saran

Akhirnya penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kebijakan dalam pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kolonial Belanda pada masa pergerakan nasional terhadap bangsa Indonesia merupakan suatu usaha atau alat demi kepentingan kolonial itu sendiri. Oleh karena itu di sarankan agar usaha pendidikan di Indonesia bukan merupakan suatu usaha atau tujuan tertentu bagi segolongan orang, tetapi merupakan suatu usaha nasional demi terwujudnya cita-cita nasional seperti yang telah di cantumkan dalam UUD 1945.
2. Disarankan khususnya generasi muda agar dapat bersikap dan berjiwa serta berjuang untuk mengisi kemerdekaan Indonesia seperti yang telah dilakukan para pemuda demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa pergerakan nasional.
3. Juga disarankan kepada para pendidik khususnya guru mata pelajaran sejarah agar meningkatkan proses belajar mengajar seefektif mungkin agar menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik di masa datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. 1963, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa: Bandung.
- _____. 1987, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa Bandung.
- Anonim.<http://www.e-dukasi.net/index2.php> Diakses 03 Februari 2016 Jam 14.00 WIB
- Arikunto, Suharsimi. 1990. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Danasuprata, Djumhur I. 1976, *Sejarah Pendidikan*. Bandung : CV Ilmu Bandung.
- Depdikbud. 1986. *Pendidikan di Indonesia dari Jaman Ke Jaman*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Gottschalk, Louis. 1983, *Mengerti Sejarah*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Gunawan, Ary. H. 1995, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Di Indonesia*. Bina Aksara : Jakarta.
- Harjosatoto, Suhartoyo. 1980, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Suatu Analisa Ilmiah*. Yogyakarta : Liberty.
- H. Najamudin. 2005. *Perjalanan Pendidikan Tanah Air*. Jakarta:PT Rieneka Cipta.
- Kansil, C.S.T. 1985, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Erlangga : Jakarta.
- Kartodirjo, Sartono. 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia:Sejarah Pergerakan Nasional*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Korver, A.P.E. 1985. *Serekat Islam 1912-1916*. Jakarta:Grafis press.

- Makmur, Djohan. 1993. *Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: Menggala Bhakti.
- Mestoko, Sumarsono. 1986. *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Mudyharjo, Redja. 2008. *Pengantar Pendidikan: sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya Dan Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Muljana, Slamet. 1986. *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia I*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Nasution, S. 1987. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung : Jemmars.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Penelitian Terapan*. Gajah Mada University Press : Yogyakarta.
- Rickfles, M.C. 2001. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta : Serambi.
- Said, Muhammad. 1981. *Serekat Islam 1912-1916*. Jakarta: Grafiti press.
- _____. 1981. *Pendidikan abad keduapuluh dengan latar Belakang Kebudayaanannya*. Mutiara : Jakarta.
- Sanjaya, W. 2007. *Kajian Kurikulum dan Pembelajaran*. Bandung : Sekolah Pasca Sarjana UPI.
- Sayuti, Husin. 1989, *Pengantar Metodologi Riset*, Fajar Agung, Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta:Bandung.
- Suharto, Edi. 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta: Bandung.
- Suryabrata, Sumadi. 1983. *Beberapa Aspek Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Supriyadi, Dedi. 2003. *Guru Di Indonesia, Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*. Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional.
- Surakhmad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsito: Bandung.
- _____. 1987, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsito: Bandung.

Suryobroto, 1983. *Beberapa Aspek dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta: Bina Aksara.

Tirtoprojo, Susanto. 1968, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Jakarta:PT. Pembangunan.

Yusuf, Muri. 1982. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Jakarta.